

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Mulat Triana

NIM : 022114149

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2008

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Mulat Triana

NIM : 022114149

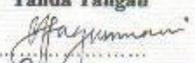
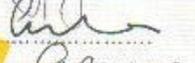
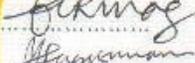
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008

Skripsi
**ANALISIS HUBUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Mulat Triana
NIM : 022114149

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 26 Januari 2008
Dan dinyatakan memenuhi syarat

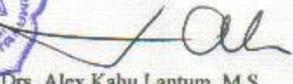
Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Giem Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Listia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Lektor	Firma Sulistriyowati, S.E., M.Si.	
Asisten Ahli	Dra. YFM. Giem Agustinawansari, M.M., Akt.	
Asisten Ahli	Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, M.Si.	

Yogyakarta, 31 Januari 2008
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



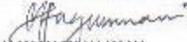
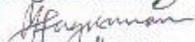

Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

Skripsi
**ANALISIS HUBUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM**
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Mulat Triana
NIM : 022114149

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 26 Januari 2008
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Lektor	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
Asisten Ahli	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Asisten Ahli	Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, M.Si.	

Yogyakarta, 14 Maret 2008
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,


Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

DALAM MENGHADAPI KEADAAN APAPUN JANGAN LENGAH,
SEBAB KELENGAHAN MENIMBULKAN KELEMAHAN
DAN KELEMAHAN MENIMBULKAN KEKALAHAN
SEDANG KEKALAHAN MENIMBULKAN PENDERITAAN.

(PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Kedua orangtua & Mertua saya
Suami dan anak saya
Serta Kakak kandung maupun ipar



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 Januari 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru Tulsan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 26 Januari 2008

Yang membuat pernyataan,

(Mulat Triana)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Mulat Triana

Nomor Mahasiswa : 022114149

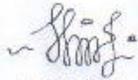
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM**
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2008

Yang menyatakan



(Mulat Triana)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- a. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
- b. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
- c. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto. M.Si., Akt., selaku Kepala Program Studi Akuntansi.
- d. Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si.,Akt., selaku dosen pembimbing I.
- e. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt., selaku dosen pembimbing II.
- f. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- g. Kepala dan Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.

- h. Kepala dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) serta Dinas Permukiman, Prasarana, dan Wilayah (Kimparaswil) Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah bersedia memberikan data yang diperlukan.
- i. Suami tercinta “abang iko” sebagai teman dan musuh dirumah. Serta *my little beb’s* “Amelia Deranaya Shafira” Bintang kecil yang selalu menjadi rem cakram dalam setiap jejak langkahku.
- j. Bapak, ibu, mertua, kakak (kandung / ipar), ponakan-ponakan yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan kuliah.
- k. Teman-teman yang selalu disampingku (dian, lisa, tata, sari, dina, sefi, sovi, lintang) terimakasih atas persahabatan kita.
- l. Teman-teman seangkatan Akt’02 khususnya kelas C, terima kasih atas semua kebersamaannya.
- m. Teman-teman MPT seangkatanku, terima kasih atas kerjasamanya.
- n. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 26 Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Dasar-Dasar Perpajakan.....	6
B. Pajak Daerah.....	12
C. Kebijakan Akuntansi.....	14
D. Pengertian Umum tentang Pajak Penerangan Jalan.....	18
E. Dana Penerangan Jalan Umum.....	20
F. Efisiensi.....	21
G. Koefisien Korelasi dan Uji Signifikansi.....	21
H. Penelitian Terdahulu.....	22

	I. Hipotesis.....	23
	J. Model Penelitian.....	23
BAB III	METODE PENELITIAN.....	26
	A. Jenis Penelitian.....	26
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
	C. Subyek Penelitian.....	26
	D. Obyek Penelitian.....	26
	E. Data yang Dicari.....	27
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
	G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	GAMBARAN UMUM PEMKOT YOGYAKARTA.....	32
	A. GEOGRAFI.....	32
	B. PEMERINTAHAN.....	33
	C. PENDUDUK DAN TENAGA KERJA.....	34
	D. SOSIAL.....	36
	E. PERTANIAN.....	39
	F. INDUSTRI.....	41
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Deskripsi Data.....	43
	B. Analisis Data.....	44
	C. Pembahasan.....	49
BAB VI	A. Kesimpulan.....	53
	B. Keterbatasan Penelitian.....	54
	C. Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA.....	56
	LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Luas Wilayah, Jumlah RW dan Jumlah RT Tahun 2005.....	34
Tabel 2 : Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut Tahun 2005.....	37
Tabel 3 : Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Tahun 2005.....	40
Tabel 4 : Pelanggan PLN menurut Kecamatan Tahun 2005.....	42
Tabel 5 : Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2005.....	43
Tabel 6 : Dana Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2005.....	43
Tabel 7 : Efisiensi Penerimaan PPJU Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2005.....	46
Tabel 8 : Perhitungan Koefisien Korelasi.....	47
Tabel 9 : Ringkasan Hasil Analisis Korelasi.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gamabar I : Model Penelitian Efisiensi.....	24
Gamabar II : Model Penelitian Korelasi.....	25

ABSTRAK

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Mulat Triana

NIM : 022114149

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2008

Tujuan Penelitian ini untuk: (1) mengetahui efisiensi pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2005. (2) mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum tahun 2001-2005. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa efisiensi pajak penerangan jalan umum akan dapat memberikan dana penerangan jalan umum sesuai dengan yang diperlukan sehingga pelayanan penerangan jalan umum dapat berjalan dengan baik.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah efisiensi, koefisien korelasi dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2005 sudah efisien, terbukti dari rasio efisiensi 4,99 % per tahun. Nilai koefisien korelasi = 0,956 menunjukkan adanya hubungan sempurna positif antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum. Dengan menggunakan taraf signifikan 5 % diperoleh nilai t – hitung sebesar 5,652, sedangkan nilai t – tabel sebesar 3,182. Oleh karena itu t – hitung lebih besar dari t – tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Jadi pajak penerangan jalan umum mempunyai koefisien korelasi secara signifikan dengan dana penerangan jalan umum.

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ROAD ILLUMINATION TAX AND THE ALLOCATION FUND OF PUBLIC ROAD ILLUMINATION A Case Study at the Municipality Government of Yogyakarta

Mulat Triana
NIM: 022114149
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2008

The purposes of this research were: 1) to know the efficiency of public road illumination at the municipality Government of Yogyakarta in 2001 – 2005; (2) to know whether there was any significant relation between the public road illumination tax and the allocation of road public road illumination fund. The background of this research was that the efficiency of public road illumination tax will give the needed fund appropriately thus the service of public road illumination can operate well.

The type of research was case study. The data were gained by conducting interview and documentation. The techniques of data analysis used were efficiency, coefficient of correlation and t-test.

The result of this research revealed that the revenue of public road illumination tax in the municipality Government of Yogyakarta in 2001 – 2005 had been efficient, it was proven from the ratio of efficiency 4,99% per year. The value of correlation coefficient of = 0,956 revealed the presence of positive relationship between the public road illumination tax with the allocation of the funds of public road illumination. By using significance level of 5% it was gained t_{count} value 5,652, whereas t_{table} value was 3,182. Thus, t_{count} was higher than t_{table} , thus H_0 was rejected and H_a was accepted. Thus, the public road illumination tax had significant coefficient of correlation significantly with the funds of public road illumination.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan sistem keuangan daerah, pajak telah menjadi bagian yang cukup *urgentif* sebagai penerimaan daerah dalam anggaran suatu daerah. Mengenai seberapa besar peran dan kontribusi pajak dalam anggaran daerah, hal ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber dari pajak daerah tersebut.

Penerimaan dari pajak daerah tersebut akan dipakai sebagai pengeluaran-pengeluaran daerah dan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Sehingga bentuk dari beberapa pelayanan masyarakat akan dibebankan terhadap pajak.

Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan terutama untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Karena bukan zamannya lagi ketika malam tiba, kota yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas infrastruktur ini gelap mencekam.

Sudah selayaknya kota yang menjadi ibukota propinsi DIY ini setiap jalan terang disinari lampu penerang. Ini bukan saja menjadi kewajiban pemerintah menerangi seisi alam Kota, tapi menjadi tuntutan warga mendapatkan penerangan dari pemerintahnya. Tidak lepas dari semua itu Pemerintah Kota Yogyakarta setiap bulan harus membayar tagihan rekening lampu penerangan jalan umum.

Penerangan jalan umum yang tagihan rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini merupakan salah satu dari pajak daerah. Sehingga pajak penerangan jalan umum dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan umum.

Pajak penerangan jalan umum adalah salah satu bagian dari penerimaan daerah yang mempunyai andil yang cukup besar bagi pemerintah daerah, karena dituntut oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerangan jalan umum. Oleh karena itu penarikan pajak penerangan jalan umum secara tidak langsung akan berpengaruh juga pada keuangan pemerintah daerah. Penerimaan daerah sangat penting untuk terus ditingkatkan agar dapat membantu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat kota membayar pajak penerangan jalan umum melalui tagihan rekening listrik, maka diharapkan penerangan jalan umum pada setiap jalan akan jauh lebih baik atau dengan kata lain masyarakat tidak merasakan gelap gulita di sepanjang jalan pada malam hari sehingga tidak terjadi kecelakaan. Apabila jalan-jalan masih tampak gelap, masyarakat kota berhak mempertanyakan pungutan Pajak Penerangan Jalan umum.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sudah efisien?
2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada penerimaan pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum untuk melihat apakah pajak penerimaan pajak penerangan jalan umum sudah efisien serta melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum selama tahun 2001 sampai dengan 2005.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sudah efisien.

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kota dalam penentuan tarif pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum dapat memberikan pelayanan penerangan jalan yang lebih baik kepada masyarakat maupun pemakai jalan umum.

2. Manfaat Bagi Universitas Sanata Dharma

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan atau menambah kepustakaan pada universitas serta dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan tentang sektor publik yaitu mengenai hubungan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan, serta sebagai sarana untuk memperkenalkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama menempuh kuliah dalam praktek sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung tentang terlaksananya penelitian, yang meliputi dasar-dasar perpajakan, pengertian pajak daerah, kebijakan akuntansi keuangan daerah, dan mengenai pengertian umum pajak penerangan jalan umum.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Pemerintah Kota Yogyakarta, lokasi dan luas wilayah, jumlah penduduk, mata pencaharian, agama dan kepercayaan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa data, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran-saran yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar-Dasar Perpajakan

1. Definisi dan Unsur Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., dalam Mardiasmo (2000: 1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2000: 2):

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3. Syarat Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2000: 2-3):

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2000: 4):

b. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

b. Teori Kepentingan

Pemabagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Ada 2 pendekatan yang digunakan :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Pajak yang terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

5. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut menurut Mardiasmo (2000: 5):

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci :

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
 - a) Hukum Pajak
 - b) Hukum Pidana

6. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak menurut Mardiasmo (2000: 5) yakni :

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- b. Hukum pajak formil, memuat tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

7. Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2000: 6-7)

- a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak Daerah, contoh : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, dan Pajak penerangan jalan.

8. Tata Cara Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2000: 7):

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel :

- 1) Stelsel nyata (*riil stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan objek pajak (panghasilan yang nyata).
- 2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu negara berhak mengenakan pajak atas wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri.
- 2) Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (Mardiasmo, 2000: 93)

2. Prinsip-prinsip Perpajakan Daerah

Apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara didunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut (Sidik, 2000) :

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, dan horisontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

3. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu menurut Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaran Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri atas :
 - 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

C. Kebijakan Akuntansi

1. Pendahuluan

Secara garis besar kebijakan akuntansi meliputi beberapa hal sebagai berikut menurut Bastian (2002: 47) :

- a. Pengukuran atau *measurement*, adalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi.
- b. Penilaian atau *valuation*, adalah penentuan jumlah rupiah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.
- c. Definisi, adalah pengertian istilah atau nama-nama rekening yang dipergunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusunan dan kesalahan interpretasi oleh pemakai.
- d. Pengakuan atau *recognition*, berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak, dengan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.

- e. Pengungkapan / Penyajian atau *disclosure / presentation*, berhubungan dengan bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan, termasuk penentuan masuk tidaknya informasi tambahan yang penting (kualitatif maupun kuantitatif) ke dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Keuangan Daerah (Bastian, 48-49):
- a. Kebijakan Umum Laporan Keuangan Daerah
 - 1) Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan.
 - 2) Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai.
 - 3) Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran, laporan arus kas, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas, dan neraca.
 - 4) Asumsi dasar atas transaksi adalah transaksi diakui atas dasar akrual.
 - 5) Periode akuntansi adalah satu anggaran.
 - b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
 - 1) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunanya.
 - 2) Relevan, artinya penyajian informasi keuangan harus sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.

- 3) Andal, artinya informasi keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan sebagai penyajian jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- 4) Dapat diperbandingkan, artinya informasi keuangan suatu daerah harus dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan periode sebelumnya dalam daerah yang sama, dan dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan daerah lain dalam periode yang sama.

3. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan (Bastian, 2002: 49-53):

a. Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan utang/kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

- 1) Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan terealisasi.
- 2) Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun /terbentuk.

c. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pajak Daerah

- 1) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 2) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hotel dan Restoran

- 3) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Reklame
 - 4) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hiburan
 - 5) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pengakuan dan pengukuran pendapatan lain-lain yang syah
 - 7) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Retribusi Daerah
 - 8) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Bagian Laba BUMD
 - 9) Pengakuan dan pengukuran pendapatan dinas-dinas
4. Kebijakan Akuntansi untuk Belanja/Biaya (Bastian, 53-54):
- a. Definisi Belanja/Biaya

Belanja/Biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu.
 - b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja/Biaya

Belanja/Biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas dari bias.

D. Pengertian Umum tentang Pajak Penerangan Jalan

1. Pengertian menurut Kurniawan (2004: 74-75) sebagai berikut:

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

2. Objek pajak penerangan jalan yakni penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
3. Pengecualian objek pajak
Pajak penerangan jalan dikecualikan terhadap beberapa objek berikut :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan , konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.
 - d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
4. Subjek pajak penerangan jalan yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
5. Wajib pajak penerangan jalan yakni orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan diatur dalam keputusan menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan.

6. Dasar pengenaan pajak

Pengenaan pajak penerangan jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

Sedangkan besarnya nilai jual tenaga listrik ini ditetapkan, jika :

- a. Tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik yakni jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian *kilowatt hour* / kwh yang ditetapkan dalam ekening listrik.
- b. Tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah bersangkutan.

Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.

7. Tarif penerangan jalan paling tinggi yakni sebesar 10%, yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sesuai dengan peraturan daerah Nomor : 3 Tahun 2000, besar pajak penerangan jalan yang bukan untuk industri sebesar 8% dari tagihan listrik yang dibebankan kepada masyarakat, sedangkan untuk industri yaitu sebesar 4% dan penggunaan listrik yang berasal dari bukan PLN sebesar 4 %.

8. Besarnya pajak terutang

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jika penerangan jalan yang

terutang dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

9. Tempat pemungutan pajak penerangan jalan yang terutang yakni di wilayah penggunaan tenaga listrik.

E. Dana Penerangan Jalan Umum

Pemerintah Daerah di dalam memberikan pelayanan penerangan jalan telah memberikan wewenang kepada KPPD sebagai badan pemerintah yang menangani keuangan daerah dan Dinas Permukiman, Prasarana dan Wilayah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas harian dalam pelayanan penerangan jalan umum. Dalam tugasnya Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum melakukan pemeliharaan lampu, penataan lampu dan mengurus rekening Penerangan jalan umum serta biaya yang digunakan untuk memungut pajak penerangan jalan umum.

F. Efisiensi

Menurut Anthony (1992: 202), efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang digunakan suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika pusat pertanggungjawaban tersebut :

1. Menggunakan sumber biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama.

2. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang ditetapkan. Standar pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.

Menurut Halim (2004: 134), efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak penerangan jalan umum dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 %. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

G. Koefisien Korelasi dan Uji Signifikansi

1. Koefisien korelasi (Rumus Karl Pearson)

Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk Koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf r . (Suharyadi 2004: 461)

2. Uji Signifikansi

Untuk menguji signifikansi dengan menggunakan uji t. Uji signifikansi koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Apabila besarnya hubungan sama dengan nol, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Dan sebaliknya apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan nol, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. (Suharyadi 2004: 466)

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhartono (2004) yang mengambil judul Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Dana Penerangan Jalan Umum menggunakan koefisien korelasi, persamaan regresi dan pengujian statistik uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penelitian menggunakan koefisien korelasi menjelaskan hubungan searah atau positif yang kuat antara pajak penerangan jalan umum dengan dana penerangan jalan umum.
2. Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji t membuktikan bahwa pajak penerangan jalan umum berpengaruh signifikan terhadap dana penerangan jalan umum.

I. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara tentatif atau sementara untuk menjelaskan suatu fakta atau dipakai sebagai dasar suatu penelitian. (Budiyuwono, 2001: 206)

Ho : menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum.

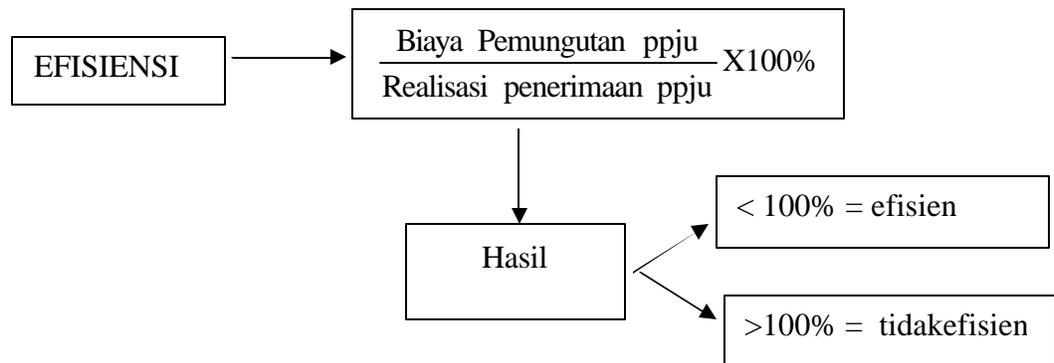
Ha : menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum.

J. Model Penelitian

1. Untuk mengetahui efisiensi dari penerimaan pajak penerangan jalan umum maka digunakan rasio efisiensi yaitu membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak penerangan jalan umum dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum dikalikan 100 %.

Apabila rasio efisien kurang dari 1 atau 100 % maka dikatakan efisien.

Sebaliknya kalau lebih atau diatas 100 % dikatakan tidak efisien.



Gambar I : Model Penelitian Efisiensi

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum terlebih dahulu mencari hubungan kedua variabel dengan menggunakan rumus koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf r . Dan kriteria dari koefisien korelasi tersebut sebagai berikut :

Bila $r = 1$ hubungan X dan Y sempurna positif

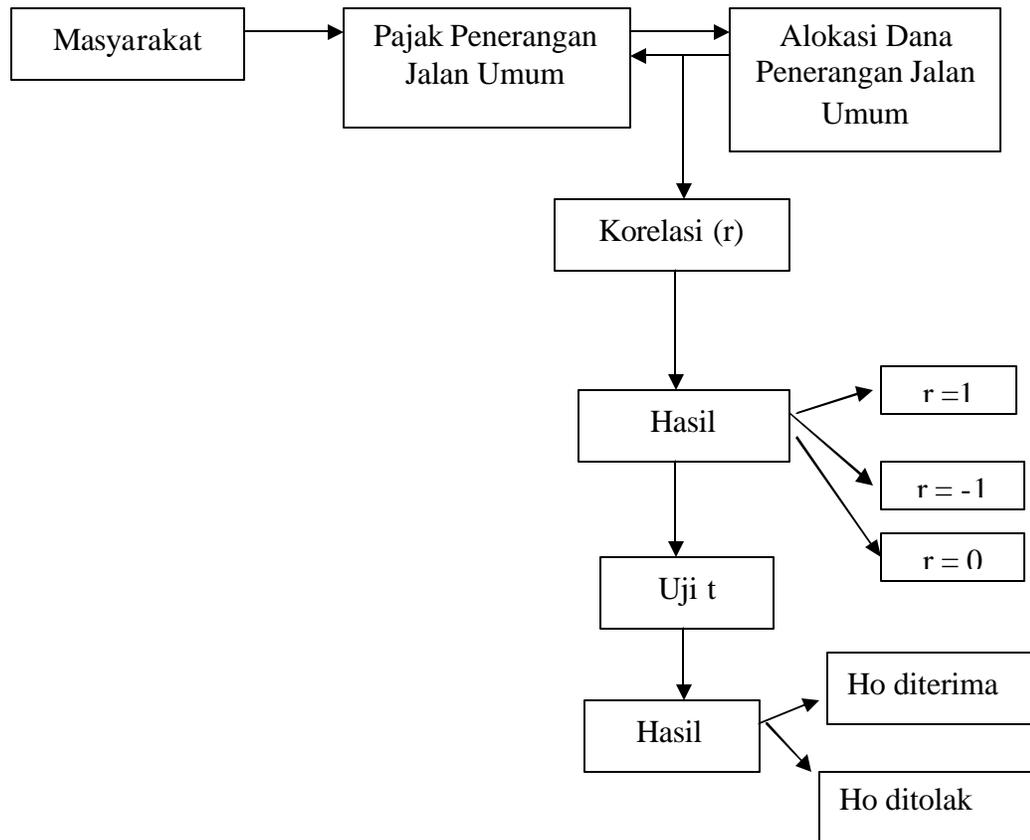
Bila $r = -1$ hubungan X dan Y sempurna negatif

Bila $r = 0$ hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan

Setelah mencari r maka untuk mengetahui ada tidaknya signifikan hubungan dilakukan uji t , dengan kriteria sebagai berikut :

H_0 diterima jika $-(a/2; n-2) \leq t_0 \leq (a/2; n-2)$

H_0 ditolak jika $t_0 \geq (a/2; n-2)$ atau $-t_0 \leq (-a/2; n-2)$



Gambar II : Model Penelitian Korelasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian difokuskan terhadap obyek tertentu sehingga kesimpulan yang diambil terbatas pada obyek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta, dan waktu penelitian akan dilaksanakan Juni – Agustus 2007.

C. Subyek Penelitian

Bagian Adminstrasi dan Akuntansi pada KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah) dan Dinas Kimpraswil (Permukiman Prasarana dan Wilayah).

D. Obyek Penelitian

Data tentang pajak penerangan jalan umum dan data tentang alokasi dana penerangan jalan umum yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Data yang Dicari

1. Data mengenai besarnya pajak penerangan jalan umum yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

2. Data mengenai tagihan rekening pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PLN selama periode tahun 2001 sampai dengan 2005.
3. Data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak penerangan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 2005.
4. Data mengenai jumlah alokasi dana yang digunakan sebagai kepentingan atau pemeliharaan penerangan jalan umum oleh Dinas Permukiman Prasarana dan Wilayah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak perusahaan atau instansi pemerintah.

2. Dokumentasi

Dengan melihat tabel dari besarnya penerimaan pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2001 sampai dengan 2005.

G. Teknik Analisis Data

1. Efisiensi

Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum sudah efisien, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengambil data biaya pemungutan pajak penerangan jalan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. Mengambil data realisasi pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Memasukkan data biaya pemungutan pajak penerangan jalan umum dan realisasi pajak penerangan jalan umum kedalam rumus

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PPJU}}{\text{Realisasi PPJU}} \times 100 \%$$

- d. Memasukkan hasil perhitungan rasio efisiensi kedalam tabel :

Rencana tabel efisiensi penerimaan pajak penerangan jalan umum
Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001-2005

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PPJU	Realisasi PPJU	Rasio Efisiensi (%)
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			

Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak penerangan jalan umum dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 %. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

2. Koefisien korelasi (Rumus Karl Pearson)

Rumus ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum.

Untuk mengetahui hubungan kedua variabel maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengambil data Realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 2005.
- b. Mengumpulkan dan mengambil data tentang dana yang digunakan untuk pemeliharaan maupun hal yang lain guna kepentingan penerangan jalan umum pada tahun 2001 sampai dengan 2005.
- c. Memasukkan data pajak penerangan jalan umum (1) dan alokasi dana penerangan jalan umum (2) ke dalam rumus korelasi koefisien sebagai berikut :

$$r = \frac{n \cdot \Sigma XY - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{\sqrt{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot (\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi pajak penerangan jalan dan dana penerangan jalan.

X = pajak penerangan jalan umum

Y = alokasi dana penerangan jalan umum

n = jumlah tahun yang digunakan

- d. Mengetahui ukuran kuat tidaknya suatu hubungan antara kedua variabel dengan standar ukuran r sebagai berikut :

Bila $r = 1$ hubungan X dan Y sempurna positif yang artinya apabila pajak penerangan jalan tinggi maka alokasi dana penerangan jalan umum juga tinggi.

Bila $r = -1$ hubungan X dan Y sempurna negatif artinya apabila pajak penerangan jalan tinggi maka alokasi dana penerangan jalan umum rendah dan sebaliknya apabila pajak penerangan jalan rendah maka alokasi dana penerangan jalan umum tinggi.

Bila $r = 0$ hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan antara pajak penerangan jalan dengan alokasi dana penerangan jalan.

3. Uji t

Uji signifikansi ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum nyata atau tidak. Maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternative

$H_0 : r = 0$ hipotesa nol (H_0) menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum.

$H_a : r \neq 0$ hipotesa alternatif (H_a) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum.

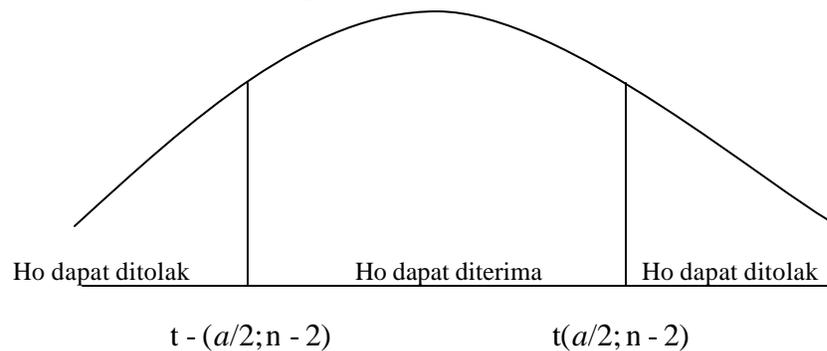
- b. Menentukan level of significant (α) = 5 %
 c. Menentukan nilai uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad \text{atau} \quad t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$$

Keterangan :

- t : Nilai t-hitung
 r : Nilai koefisien korelasi
 n : Jumlah data pengamatan

- d. Menentukan daerah keputusan nilai t yang telah dihitung



- e. Kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima dan H_a ditolak bila

$$-(\alpha/2; n - 2) \leq t_o \leq (\alpha/2; n - 2)$$

H_0 ditolak dan H_a diterima bila

$$t_o \geq (\alpha/2; n - 2) \text{ atau } -t_o \leq (-\alpha/2; n - 2)$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. Geografi

1. Keadaan Alam

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°49'26"-07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung merapi memiliki kemiringan lahan yang relative datar (antara 0-2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu : Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan sungai Winongo di bagian barat kota.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah :

Sebelah Utara	: Kabupaten Sleman
Sebelah Timur	: Kabupaten Bantul dan Sleman
Sebelah Selatan	: Kabupaten Bantul
Sebelah Barat	: Kabupaten Bantul dan Sleman

2. Iklim

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2005 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 180,4 mm dan terendah terjadi pada bulan Nopember (0 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 5,55 hari.

Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 87 persen dan terendah pada bulan September-oktober sebesar 72 persen. Tekanan udara rata-rata 1.027,8 mb dan suhu udara rata-rata 27,8°C.

B. Pemerintahan

1. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota berasal dari 5 fraksi.

2. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 612 RW dan 2.522 RT dengan luas wilayah 32,5 Km². Penggunaan lahan paling banyak

diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,190 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 20,208 hektar.

Tabel 1 Luas wilayah, Jumlah RW dan Jumlah RT Tahun 2005

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
Mantrijeron	Gedongkiwo	0.90	18	86
	Suryodiningratan	0.85	17	69
	Mantrijeron	0.86	20	75
		2.61	55	230
Kraton	Patehan	0.40	10	44
	Panembahan	0.66	18	78
	Kadipaten	0.34	15	53
		1.40	43	175
Mergangsan	Brontokusuman	0.93	23	83
	Keparakan	0.53	13	57
	Wirogunan	0.85	24	76
		2.31	60	216
Umbulharjo	Giwangan	1.26	13	42
	Sorosutan	1.68	16	63
	Pandean	1.38	12	46
	Warungboto	0.83	9	38
	Tahunan	0.78	11	48
	Muja- muju	1.53	12	55
	Semaki	0.66	10	34
		8.12	83	326
Kotagede	Prenggan	0.99	13	57
	Purbayan	0.83	14	58
	Rejowinangun	1.25	13	49
		3.07	40	164
Gondokusuman	Baciro	1.06	21	88
	Demangan	0.47	12	44
	Klitren	0.68	16	63
	Kotabaru	0.71	4	21
	Terban	0.80	12	59
		3.72	65	275

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta

C. Penduduk dan Tenaga Kerja

1. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 sebesar -0,37 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2005 tercatat 435.236 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,87 persen laki-laki dan 51,13 persen perempuan.

2. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2005 tercatat 9.369 orang, yang terdiri dari 87,79 persen pegawai pemerintah daerah dan 12,21 persen pegawai pemerintah pusat.

Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 11,41 persen, golongan II 19,55 persen, golongan III 51,49 persen dan sisnya golongan IV 27,55 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005 sebanyak 26.860 orang yang terdiri dari 14.519 laki-laki dan 12.341 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan

sarjana yaitu 57,02 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (30,63 persen), Diploma (10,25 persen), dan sisanya berpendidikan S2, SMTP, dan SD.

3. Transmigrasi

Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2005 tercatat 36 kepala keluarga yang terdiri dari 123 jiwa. Sebagian besar transmigran tersebut berasal dari Kecamatan Kotagede dan Tegalrejo, dan daerah penempatan terbanyak adalah Jambi.

D. Sosial

1. Pendidikan

Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2005/2006 di Kota Yogyakarta terdapat 49 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 6 universitas, 15 institut/sekolah tinggi dan 28 akademi. Jumlah dosen sebanyak 1.923 orang yang terdiri dari 4.623 orang dosen yayasan dan 300 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 42.629 orang.

2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2005 jumlah dokter praktek di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1.105 orang pada tahun 2004 menjadi 1.635 orang pada tahun 2005. Jumlah apotek dan pedagang besar farmasi masing-masing adalah 113 dan 39.

Untuk menekan pertumbuhan penduduk pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat terhadap program tersebut cukup positif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang aktif menjadi akseptor. Pada tahun 2005 jumlah akseptor tercatat 36.187 orang atau 74,15 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang terdapat di Kota Yogyakarta. Alat Kontrasepsi yang banyak digunakan adalah IUD (35,56 persen).

3. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2005 sebanyak 345.040 orang atau 82,32 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,66 persen Katholik, 6,32 persen Kristen, 0,2 persen Hindu, dan 0,40 persen Budha.

Tabel 2 Penduduk menurut kecamatan dan Agama yang Dianut Tahun 2005

Kecamatan	Islam	Katholik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1. Mantrijeron	29,588	3,682	2,195	72	144	37	35,718
2. Kraton	17,962	2,230	1,355	44	87	22	21,700
3. Mergangsan	28,528	3,551	2,104	69	139	35	34,426
4. Umbulharjo	62,868	7,892	4,699	152	306	79	75,996
5. Kotagede	25,317	3,173	1,901	61	124	32	30,608
6. Gondokusuman	43,861	5,567	3,357	106	214	55	53,160
7. Danurejan	17,921	2,272	1,326	44	87	23	21,673
8. Pakualaman	9,566	1,239	734	23	47	12	11,621
9. Gondomanan	12,580	1,573	942	33	69	25	15,222
10. Ngampilan	15,855	2,054	1,217	38	78	20	19,262

Tabel 2 (Lanjutan)

11. Wirobrajan	24,152	3,015	1,845	58	117	30	29,217
12. Gedongtengen	16,126	2,089	1,238	39	79	21	19,592
13. Jetis	23,616	2,926	1,738	57	114	29	28,480
14. Tegalarjo	31,872	3,981	2,435	77	156	40	38,561
Jumlah	359,812	45,244	27,086	873	1,761	460	435,236
2004	329,376	40,516	25,122	870	1,723	397	398,004
2003	323,132	41,475	24,584	780	1,565	403	392,239

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta

4. Peradilan

Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala terjadinya peningkatan. Pada tahun 2005 perkara pelanggaran yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 19.084 perkara atau naik 34,35 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula jumlah tahanan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta naik dari 386 pada tahun 2004 menjadi 484 pada tahun 2005. Penghuni lembaga pemasyarakatan bertambah dari 366 orang menjadi 384 orang.

5. Sosial lainnya

Jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti pada tahun 2005 sebanyak 466 anak yang terdiri dari 207 anak laki-laki dan 259 anak perempuan. Jumlah penderita cacat tercatat 2.065 orang. Pada tahun 2004 orang terlantar berjumlah 392 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 500 orang.

E. Pertanian

1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya, tegal/kebun, lading/huma, padang rumput, tambak, kolam/tebat /empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara/swasta.

Pada tahun 2005 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.249 hektar, terdiri dari 120 hektar lahan sawah dan 3.129 hektar lahan bukan sawah.

2. Tanaman Pangan

Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2005 mencapai 167 hektar dengan produksi 862 ton gabah kering giling. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi padi sawah mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan luas panen.

3. Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominant adalah kelapa. Pada tahun 2005 populasi tanaman kelapa sebanyak 7.612 pohon dan 6.557 pohon di antaranya sudah menghasilkan dengan total produksi 80,72 ton.

4. Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2005 tercatat 1,168 kuintal yang terdiri dari 125 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 91 kuintal perikanan sawah, 904 kuintal perikanan kolam dan 48 kuintal produksi ikan dalam karamba. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan terjadi pada produksi ikan di perairan sawah, sedangkan budidaya ikan mengalami kenaikan.

5. Peternakan

Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi perah dan kuda pada tahun 2005 secara berturut-turut adalah 15 ekor, 181 ekor, 38 ekor dan 51 ekor.

Sementara itu populasi kambing, domba, babi, dan kelinci yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 214 ekor, 500 ekor, 230 ekor dan 82 ekor. Populasi ternak kecil paling banyak terdapat di Kecamatan Kotagede. Populasi unggas yang terdiri dari burung puyuh, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, dan itik berturut-turut adalah 8.400 ekor, 3000 ekor, 0 ekor, 58.764 ekor dan 1.064 ekor.

Tabel 3 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Tahun 2005

Kecamatan	Luas Lahan		Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah	
1. Mantrijeron	4	257	261
2. Kraton	0	140	140
3. Mergangsan	5	226	231
4. Umbulharjo	61	751	812
5. Kotagede	26	281	307
6. Gondokusuman	0	399	399

Tabel 3 (Lanjutan)

7. Danurejan	0	110	110
8. Pakualaman	0	63	63
9. Gondomanan	0	112	112
10. Ngampilan	0	82	82
11. Wirobrajan	0	176	176
12. Gedongtengen	0	96	96
13. Jetis	0	170	170
14. Tegalarjo	24	266	290
Jumlah	120	3,129	3,249

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Kehewananan Kota Yogyakarta

F. Industri

1. Industri

Industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumahtangga. Perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 sebanyak 106 perusahaan dengan 8.544 tenaga kerja. Pada tahun 2005 jumlah industri kecil tercatat 5.854 unit dengan jumlah tenaga kerja 30.516 orang dan nilai investasi sebesar Rp. 151.834 juta. Industri kecil yang paling banyak adalah industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

2. Air minum

Berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta, produksi air minum pada tahun 2005 mencapai 18.635.137 m² atau naik 6,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Volume air yang disalurkan hanya 10.752.431 m² atau 57,70 persen dari total produksi.

3. Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 tercatat 96.392 pelanggan. Berdasar data dari PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Yogyakarta, jumlah pelanggan tercatat 152.768. Namun jumlah tersebut termasuk pelanggan dari Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Mayoritas pelanggan adalah rumah tangga yaitu sebesar 88.48 persen, dengan jumlah pemakaian 274.346.306 KWh atau 47,58 persen dari total pemakaian.

Tabel 4 Pelanggan PLN menurut Kecamatan Tahun 2005

Kecamatan	Pelanggan		
	2003	2004	2005
1. Mantrijeron	7,118	7,383	7,574
2. Kraton	6,137	6,209	6,287
3. Mergangsan	7,654	7,809	7,964
4. Umbulharjo	14,912	15,603	16,256
5. Kotagede	6,174	6,402	6,646
6. Gondokusuman	11,898	12,183	12,384
7. Danurejan	5,126	5,258	5,306
8. Pakualaman	2,231	2,273	2,311
9. Gondomanan	3,652	3,706	3,756
10. Ngampilan	3,854	3,906	3,952
11. Wirobrajan	4,153	4,271	4,384
12. Gedongtengen	4,440	4,522	4,597
13. Jetis	6,211	6,327	6,422
14. Tegalrejo	8,085	8,358	8,553
Jumlah	91,645	94,210	96,392
15. Depok	33,727	35,615	37,114
16. Banguntapan	17,547	18,511	19,226
Total	142,919	148,336	152,768

Sumber Data : PT. PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Yogyakarta

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan untuk menganalisis Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari segi efisiensi penerimaan pajak dan hubungan penerimaan pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum adalah data penerimaan pajak penerangan jalan umum dari tahun 2001 sampai dengan 2005, Data dana penerangan jalan umum dari tahun 2001 sampai dengan 2005. Data tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 5 Pajak Penerangan Jalan Umum
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2001	4.800.000.000	7.793.350.928
2002	9.294.665.100	10.364.342.556
2003	11.652.868.000	11.809.188.645
2004	12.733.000.000	14.176.664.924
2005	13.900.000.000	15.159.696.951
Jumlah	52.380.533.100	59.303.244.004

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

Tabel 6 Dana Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2001-2005 (Dalam Rupiah)

Tahun	Dana Pemeliharaan	Tagihan Rek. Listrik PJU	Biaya Pemungutan Listrik	Dana PJU
2001	208.074.800	5.183.454.105	389.667.546	5.781.196.451
2002	381.349.300	5.031.068.785	518.217.128	5.930.635.213
2003	494.880.185	5.531.717.725	590.459.432	6.617.057.342
2004	618.900.800	6.201.881.504	708.833.246	7.529.615.550
2005	661.700.550	6.781.399.730	757.984.847	8.201.085.127

Sumber : Dinas Permukiman, Prasarana, dan Wilayah Pemkot Yogyakarta

B. Analisis Data

Penelitian yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum, maka dalam pembahasan ini digunakan analisis efisiensi yaitu untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah efisien, dan untuk mencari hubungan antara pajak penerangan jalan umum dengan dana penerangan jalan umum maka analisis yang digunakan adalah analisis korelasi, yang membutuhkan dua variabel yang akan digunakan diantaranya variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini sebagai variabel independen adalah penerimaan pajak penerangan jalan umum, dan sebagai variabel dependen adalah dana penerangan jalan umum.

Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak penerangan jalan umum, tagihan rekening listrik penerangan jalan umum dan realisasi dana pemeliharaan atau penataan penerangan jalan umum Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Data yang akan dianalisis untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum sudah efisien adalah data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum dan data biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak penerangan jalan umum. Setelah itu dicari apakah

ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum yang menggunakan data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum dan dana penerangan jalan umum seperti biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak, tagihan rekening listrik, serta dana pemeliharaan atau penataan lampu penerangan jalan umum.

1. Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan tehnik efisiensi, tehnik ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan umum sebagai pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah efisien. Dalam analisis ini inputnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak penerangan jalan umum, sedangkan outputnya adalah realisasi penerimaan pajak reklame. Dan untuk mengetahui efisiensi penerimaan pajak penerangan jalan umum di Pemerintah Kota Yogyakarta digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Penerimaan PPJU} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PPJU}}{\text{Realisasi Penerimaan PPJU}} \times 100\%$$

Perhitungannya :

$$\text{Efisiensi Penerimaan PPJU 2001} = \frac{\text{Rp } 389.667.546,-}{\text{Rp } 7.793.350.928,-} \times 100\% = 4,99 \%$$

$$\text{Efisiensi Penerimaan PPJU 2002} = \frac{\text{Rp } 518.217.128,-}{\text{Rp } 10.364.342.556,-} \times 100\% = 5 \%$$

$$\text{Efisiensi Penerimaan PPJU 2003} = \frac{\text{Rp } 590.459.432,-}{\text{Rp } 11.809.188.645,-} \times 100\% = 4,99 \%$$

$$\text{Efisiensi Penerimaan PPJU 2004} = \frac{\text{Rp } 708.833.246,-}{\text{Rp } 14.176.664.924,-} \times 100\% = 4,99 \%$$

$$\text{Efisiensi Penerimaan PPJU 2005} = \frac{\text{Rp } 757.984.847,-}{\text{Rp } 15.159.696.951,-} \times 100\% = 4,99 \%$$

Secara jelas, efisiensi penerimaan pajak penerangan jalan umum di Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditunjukkan pada tabel 5 sebagai berikut ini :

Tabel 7 Efisiensi Penerimaan PPJU Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2005 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PPJU (Rp)	Realisasi PPJU (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2001	389.667.546	7.793.350.928	4,99
2002	518.217.128	10.364.342.556	5
2003	590.459.432	11.809.188.645	4,99
2004	708.833.246	14.176.664.924	4,99
2005	757.984.847	15.159.696.951	4,99
Rata-rata			4,99

2. Analisis Korelasi

Untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu dengan mencari besarnya tingkat hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum dengan mencari koefisien korelasi (r) dengan rumus koefisien korelasi Karl Pearson. Hubungan kedua variabel tersebut dikatakan kuat apabila nilai r mendekati +1. Untuk lebih mudah dalam perhitungan maka dapat digunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 8 Perhitungan Koefisien Korelasi
Berdasarkan Rumus Karl Pearson (Dalam Juataan Rupiah)

PPJU (X)	Dana PJU (Y)	XY	X ²	Y ²
7.793,3	5.781,2	45.054.625,96	60.735.524,89	33.422.273,44
10.364,3	5.930,6	61.466.517,58	107.418.714,5	35.172.016,36
11.809,2	6.617,1	78.142.657,32	139.457.204,6	43.786.012,41
14.176,7	7.529,6	106.744.880,3	200.978.822,9	56.694.876,16
15.159,7	8.201,1	124.326.215,7	229.816.504,1	67.258.041,21
59.303,2	34.059,6	415.734.896,8	738.406.771	236.333.219,6

$$r = \frac{n \cdot \Sigma XY - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{\sqrt{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot (\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2}}$$

$$r = \frac{5 \times 415.734.896,8 - (59.303,2) (34.059,6)}{\sqrt{5 \times 738.406.771 - (59.303)^2} \cdot \sqrt{5 \times 236.333.219,6 - (34.059,6)^2}}$$

$$r = \frac{2.078.674.484 - 2.019.843.271}{\sqrt{3.692.033.855 - 3.516.869.530} \cdot \sqrt{1.181.666.098 - 1.160.056.352}}$$

$$r = \frac{58.831.213}{\sqrt{175.164.325} \cdot \sqrt{21.609.746}}$$

$$r = \frac{58.831.213}{13.234,966 \times 4.648,6284}$$

$$r = \frac{58.831.213}{61.524.438,82}$$

$$r = 0,956$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui koefisien korelasi (r) = 0,956. Ini berarti terdapat suatu hubungan positif yang kuat antara pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum. Artinya apabila pajak penerangan jalan umum mengalami kenaikan maka alokasi dana penerangan jalan juga semakin meningkat.

Untuk mengetahui apakah nilai korelasi (r) yang diperoleh itu signifikan atau tidak maka dilakukan pengujian terhadap nilai r tersebut dengan uji t dan taraf uji 5 % serta dengan derajat kebebasan (n-2). Sehingga diperoleh t_{tabel} 3,182. Dan untuk t_{hitung} dapat dilihat pada rumus berikut ini :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,956\sqrt{5-2}}{\sqrt{1-0,956^2}}$$

$$t = \frac{1,656}{0,293}$$

$$t = 5,652$$

Karena t_{hitung} > t_{tabel} (5,652 > 3,182), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana

penerangan jalan umum, yang artinya apabila penerimaan pajak penerangan jalan umum naik maka alokasi dana penerangan jalan umum juga akan mengalami kenaikan.

C. Pembahasan

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis efisiensi dan analisis koefisien korelasi. Dimana analisis efisiensi digunakan untuk melihat kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan pajak, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya sudah efisien atau tidak. Sedangkan untuk melihat hubungan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum maka dilakukan analisis korelasi.

Dalam analisis efisiensi diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak penerangan jalan umum dikatakan efisien karena rasio yang dicapai kurang dari 100 % yaitu 4,99 % atau bisa dikatakan 5% per tahun. Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pada Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki rasio efisiensi penerimaan pajak penerangan jalan umum sama, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut meningkat. Dengan analisis efisiensi tersebut maka dapat dilihat bahwa pada Pemerintah Kota Yogyakarta kinerja pemungutan pajak penerangan jalan umum yang dilakukan oleh aparat pemungut sudah cukup baik, sehingga tiap tahun pemungutan yang dilakukan dapat berjalan efisien.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8 diketahui bahwa pajak penerangan jalan umum (PPJU) mempunyai hubungan positif dengan alokasi dana

penerangan jalan umum (Dana PJU). Artinya bila pajak penerangan jalan umum Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan maka akan terjadi pula kenaikan pada alokasi dana penerangan jalan umum. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui besarnya hubungan pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu sebesar $(r) = 0.956$ yang berarti hubungan antara pajak penerangan jalan umum dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta positif kuat.

Untuk mengetahui bahwa pajak penerangan jalan mempunyai hubungan yang signifikan dengan alokasi dana penerangan jalan maka hasil analisis korelasi perlu diuji dengan menggunakan uji t. Dari hasil pengujian menggunakan statistic uji t diperoleh t hitung $5,652 > t$ tabel sebesar $3,182$. Sehingga nilai t hitung terletak pada daerah kritis yaitu daerah penolakan H_0 dan penerimaan H_a , maka dengan demikian terbukti bahwa pajak penerangan jalan umum mempunyai hubungan signifikan dengan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Mengenai penggunaan komputer peneliti menggunakan program SPSS 12, hasil analisis ini dapat dilihat pada lampiran. Sehingga hasil menggunakan program SPSS ini dapat digunakan peneliti sebagai pembanding dari perhitungan manual. Langkah-langkah dalam program SPSS ini sebagai berikut :

1. Mengisi *variabel* yaitu dengan mengklik *file, new, data*. Mengisi *name* pada *variabel view* dengan nama PPJU dan DanaPJU. Disamping itu perlu mensetting *type variabel, width, missing value, dan column format* sesuai yang diperlukan.
2. Kemudian mengisi *data view* sesuai jumlah PPJU dan Dana PJU kedalam masing-masing variabel.
3. menjalankan analisis korelasi dengan cara mengklik *analyze, correlate, bivariate*.
4. menjalankan perintah pada layar dengan memilih pearson pada *correlate coefficient* dan memilih *significant two-tailed*.
5. selanjutnya klik tombol OK.

Dari hasil analisis yang dilakukan baik manual atau melalui program SPSS dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 9 Ringkasan Hasil Analisis Korelasi

Hubungan	r	t _{hitung}	t _{tabel}	r
PPJU dengan Dana PJU	0,956	5,652	3,182	0.011

Berkenaan dengan perhitungan melalui SPSS ada dua hal dalam penafsiran korelasi. Apabila berdasarkan angka, korelasi berkisar pada 0 (tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna). Sebenarnya tidak ada ketentuan yang tepat mengenai apakah angka korelasi tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Namun bisa dijadikan sebagai pedoman sederhana, bahwa angka korelasi diatas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedang di bawah 0,5 korelasi lemah. Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada

penafsiran hasil. Tanda negatif (-) pada output menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif (+) menunjukkan arah yang sama.

Seperti angka pada *output* atau pada perhitungan manual antara PPJU dengan dana PJU menghasilkan angka 0,956. Angka tersebut menunjukkan kuatnya korelasi antara PPJU dengan dana PJU, seperti yang telah dijelaskan di depan pada perhitungan manual.

Setelah angka korelasi didapat, maka bagian kedua dari *output* SPSS adalah menguji apakah angka korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel. Sebagai dasar pengambilan keputusan pada program SPSS tersebut adalah berdasarkan probabilitas jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan pada komputer diperoleh hasil $r = 0,011$, probabilitas 0,011 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini membuktikan bahwa antara PPJU dengan Dana PJU berkorelasi secara signifikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta (2001-2005) sudah efisien, karena rasio efisiensi kurang dari 100 % yaitu 4,99 % atau 5% per tahun.
2. Terdapat hubungan antara penerimaan pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 2005. Hubungan ini bersifat positif atau searah, yang artinya apabila pajak penerangan jalan umum mengalami peningkatan, maka alokasi dana penerangan jalan umum juga mengalami peningkatan. Hasil perhitungan koefisien korelasi yang menunjukkan hubungan antara pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum yaitu sebesar $(r) = 0,956$. Hasil uji signifikansi dengan menggunakan uji t berdasarkan hasil korelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (5,652) > t_{tabel} (3,182)$. Hasil t_{hitung} tersebut terletak di daerah kritis yaitu daerah penolakan H_0 dan penerimaan H_a , maka hasil ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan, yang artinya penerimaan pajak penerangan jalan

umum naik maka alokasi dana penerangan jalan umum juga akan mengalami kenaikan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat rasio efisiensi pada Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga penulis hanya menarik kesimpulan berdasarkan tingkat rasio efisiensi pada teori yang ada, yaitu apabila tingkat rasio semakin kecil akan menggambarkan kemampuan pemungutan pajak penerangan jalan umum Pemerintah Daerah yang semakin baik.
2. Rentang waktu yang diteliti penulis hanya data 5 tahun, sehingga ada kemungkinan ketidakakuratan data yang diperoleh untuk diteliti atau dianalisis.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Dinas Permukiman, Prasarana dan Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, penulis akan memberikan saran-saran dan masukan yang sekiranya dapat membangun dan berguna untuk perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sekiranya dapat segera mengeluarkan surat keputusan untuk masyarakat dalam pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tata cara tentang panduan

permohonan pemasangan lampu penerangan jalan, yang selama ini pihak Kimpraswil hanya menunggu laporan permohonan dari masyarakat.

2. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian agar data yang diteliti atau dianalisis lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N, John Dearden, dan Norton M Bedford. 1992. **Sistem Pengendalian Manajemen**. (penerjemah Agus Maulana). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Bastian, Indra. 2002. **Sistem Akuntansi Sektor Publik Modul Untuk Penyusunan Laporan Keuangan**. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria.
- Boedijoewono, Noegroho. 2001. **Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis, Jilid 1, Edisi Keempat**. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- _____. 2002. **Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan 2, Jilid 2**. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2001. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, Panca. 2004. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia**. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2000. **Perpajakan**. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prakosa, Bambang. 2005. **Pajak dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi**. Yogyakarta: UII Pers.
- Radianto, Haning. 2005. **Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta**. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1 Nomor 1. hal 46-54.

Republik Indonesia. 2000. **Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.** Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2001. **Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor : 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.** Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Suhartono, Sylvester. 2004. **Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Dana Penerangan Jalan Umum.** Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Skripsi.

Suharyadi, Purwanto. 2004. **Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.** Jakarta: PT Salemba Empat.

Susila, I Nyoman. 1984. **Statistik (Edisi Metrik).** Yogyakarta : Erlangga.

Walpole, Ronald E . 1988. **Pengantar Statistika Edisi ke-3.** Jakarta: PT Gramedia.

LAMPIRAN



59
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan, Yogyakarta - 55213
 Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
 Website : <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
 E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3522

Membaca Surat : Ka. Prodi. FE - USD No : 31/Kaprodi AKU136/V/2007
 Tanggal : 4 Juni 2007 Perihal : Ijin Penelitian
 Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 1983 tentang Pedoman
 Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
 Departemen Dalam Negeri,
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang
 Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : MULAT TRIANA No. MHSW : 022114149
 Alamat Instansi : Mican, Tromoi Pos 29, Yogyakarta
 Judul : ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM DENGAN
 ALOKASI DANA PENERANGAN JALAN UMUM (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota
 Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 05 Juni 2007 s/d 05 September 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk sepenuhnya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Kepada Yth

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan);
2. Walikota Yogyakarta, c.c. Kadis Perijinan;
3. Ka. Dinas Kempraswii Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Ekonomi - USD;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 05 Juni 2007

A.n GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
 BIDANG PENGENDALIAN



M. SYAH AZIZ, CES.
 NIP. 149 035 037



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

60

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55185 Telepon 514448, 515885, 515888, 562682
 EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1110

5707/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor : 070/3622 Tanggal : 05/06/2007

Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
 Nomor 072/KD/1988 tanggal 6 Mei 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1988
 tentang : Tataaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
 maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004
 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Surveil/KKN/
 PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada Nama : MULAT TRIANA NO MHS / NIM 022114149

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta

Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta

Penanggungjawab : Firma Sulistyowati, SE, M Si

Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: ANALISIS HUBUNGAN
 ANTARA PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM DENGAN ALOKASI
 DANA PENERANGAN JALAN UMUM (Studi Kasus Pada Pemerintah
 Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responder : Kota Yogyakarta

Waktu : 05/06/2007 Sampai 05/09/2007

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
 (Cc. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
 Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
 ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
 bantuan seperlunya

Tanda tangan
 Pemegang izin

 MULAT TRIANA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 pada Tanggal : 09/06/2007

An. Kepala Dinas Perizinan
 Ka. Bpd. Tata Usaha



Tembusan Kepada :

Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)

2. Ka. BAPEDA Prop. D'Y

3. Ka. Dinas KIMPRASWIL Kota Yogyakarta

4. Ka. KPPD Kota Yogyakarta

5. Ybs.

Pedoman Wawancara

Data yang dicari :

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Data pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan 2005.
3. Data tentang biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak penerangan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
4. Data tentang alokasi dana yang digunakan sebagai kepentingan atau pemeliharaan penerangan jalan umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
5. Data mengenai prosedur pemungutan pajak daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya pajak penerangan jalan umum.

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Bagaimana sejarah umum Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana keadaan geografis Pemerintah Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana Keadaan Penduduk Pemerintah Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana Keadaan sektor ekonomi Pemerintah Kota Yogyakarta?
5. Bagaimana Keadaan sektor sosial Pemerintah Kota Yogyakarta?

B. Pajak Penerangan Jalan Umum

1. Ada berapa sektor pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak penerangan jalan umum?
3. Berapa realisasi pendapatan pajak daerah dari penerimaan pajak penerangan jalan umum Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan 2005?
4. Berapa besar jumlah tagihan rekening listrik penerangan jalan umum yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan 2005?

5. Apa saja alokasi dana penerangan jalan umum pada Pemerintah Kota Yogyakarta?
6. Berapa besar jumlah alokasi dana penerangan jalan umum yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005?
7. Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelayanan penerangan jalan umum?

Daftar Pembayaran / Tagihan Rekening Listrik
Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah)

No	Bulan	2001	2002	2003	2004	2005
1	Januari	468.382.640	469.279.570	439.741.100	469.541.970	511.558.600
2	Februari	460.203.200	481.188.200	496.876.600	496.018.120	539.573.775
3	Maret	483.924.355	432.118.065	518.033.395	493.089.280	538.699.510
4	April	-	384.554.490	428.467.040	552.511.845	529.956.790
5	Mei	476.472.575	384.454.915	405.388.800	553.146.110	592.352.110
6	Juni	476.008.125	394.425.690	419.663.905	494.207.409	583.337.415
7	Juli	476.472.575	386.477.190	444.006.075	472.816.095	579.457.365
8	Agustus	468.725.170	414.526.720	446.751.555	488.516.605	546.109.585
9	September	462.963.650	413.559.975	447.758.845	507.460.585	520.559.195
10	Oktober	462.953.850	409.578.740	496.576.090	621.504.650	461.718.950
11	November	473.827.950	435.155.960	494.227.160	534.089.650	442.203.205
12	Desember	473.520.015	425.749.270	494.227.160	518.979.185	935.873.230
	Jumlah	5.183.454.105	5.031.068.785	5.531.717.725	6.201.881.504	6.781.399.730

Daftar Dana Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
2001	212.575.000	208.074.800	4.500.000
2002	385.450.000	381.349.300	4.100.000
2003	495.880.190	494.880.185	1.000.005
2004	620.500.000	618.900.800	1.599.200
2005	662.800.520	661.700.550	1.099.970
Jumlah	2.277.205.710	2.264.905.635	12.300.075

Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2001 – 2005 (Dalam Rupiah)

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005
Pendapatan diluar operasional PT.PLN	210.420.475	279.837.249	318.848.094	382.769.953	409.311.818
Biaya pembinaan pemungutan PPJU	23.380.053	31.093.028	35.427.566	42.529.995	45.479.091
Biaya Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan pemungutan	77.933.509	103.643.425	118.091.886	141.766.649	151.596.969
Biaya PT.PLN sebagai pelaksanaan pemungutan PPJ	77.933.509	103.643.425	118.091.886	141.766.649	151.596.969
Jumlah	389.667.546	518.217.128	590.459.432	708.833.246	757.984.847

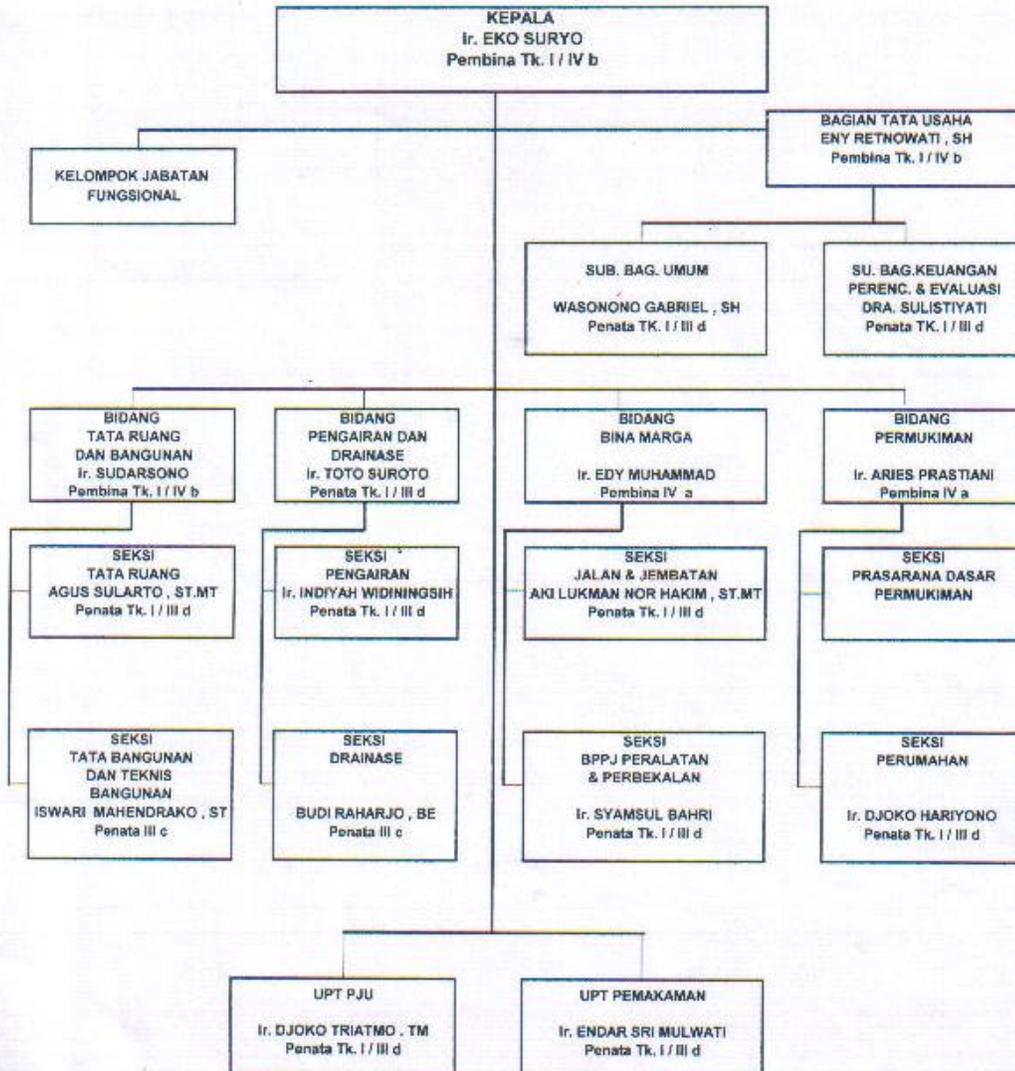
PERINCAN, TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006

No	Kategori	Perincian Tahun 2001			Perincian Tahun 2002			Perincian Tahun 2003			Perincian Tahun 2004			Perincian Tahun 2005		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I	PAJAK DAERAH	17,814,441,100	22,886,571,607.50	128.49	27,167,398,253	30,519,661,771	112.30	32,068,758,000	33,526,514,267	104.55	38,149,220,000	40,581,401,750	106.38	43,962,000,000	46,306,771,172	105.32
1	Pajak Hotel dan Restoran	6,820,020,000	12,245,242,442.00	179.56	11,910,987,000	16,241,958,253	136.34									
	-Pajak Hotel							11,849,490,000	11,839,120,295	100.00	4,228,020,000	11,408,270,126	104.27	15,907,000,000	17,494,755,870	110.02
	-Pajak Restoran							971,667,000	5,408,027,958	556.59	7,222,000,000	7,815,831,624	106.83	6,242,000,000	8,532,492,716	136.70
2	Pajak Hiburan	1,081,490,719.50	1,272,203,369.50	117.67	1,272,203,418	1,624,582,498	127.69	1,782,607,000	1,841,951,128	103.31	1,816,000,000	1,825,151,522	100.50	1,618,000,000	1,702,213,096	105.21
3	Pajak Reklame	446,248,200	867,434,365.00	194.40	1,713,547,285	1,807,304,877	105.47	1,681,777,000	1,861,625,201	110.70	1,839,000,000	1,887,180,199	102.62	2,257,000,000	2,412,840,484	106.90
4	PPJ	4,800,000,000	-	0.00	1,394,563,100	10,204,747,516	732.00	11,852,866,200	11,859,148,645	100.04	12,322,000,000	14,116,654,524	114.56	11,400,000,000	12,222,692,921	107.19
5	Pajak Parkir							110,020,000	319,930,661	290.79	210,000,000	273,888,167	129.94	280,000,000	281,961,470	100.70
6	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	500,738,100	710,541,905.00	141.89	940,940,000	811,463,212	86.14									
7	LAIN-LAIN PENDAPATAN	3,256,800	3,196,400.00	98.14	7,038,800	8,731,000	124.03	4,820,000	8,004,503	166.07	9,352,000	9,342,000	100.00	11,020,000	11,147,500	101.14
	LOK: Bunkup	3,256,800	3,196,400.00	98.14	7,038,800	8,731,000	124.03	4,820,000	8,004,503	166.07	9,352,000	9,342,000	100.00	11,020,000	11,147,500	101.14
	Air Bersih Tanah								215,503							
II	BAGI HASIL PAJAK	17,051,177,000	17,512,551,115.00	102.70	15,485,124,517	16,443,714,016	106.19	17,807,000,000	19,540,157,821	109.73	18,241,425,000	19,401,167,981	106.36	24,220,000,000	25,300,412,711	104.46
1	PPB	7,027,848,000	10,138,801,143.00	144.28	10,738,831,141	10,926,571,140	101.76	12,141,490,000	12,448,600,179	102.53	12,510,496,000	16,980,061,288	135.73	16,010,000,000	19,228,004,927	120.10
2	PPHTB	2,416,604,000	6,008,201,170.00	248.64	5,228,504,171	8,291,183,878	158.44	5,258,904,000	7,011,468,452	133.34	7,800,000,000	12,571,201,044	161.17	8,250,000,000	11,376,167,750	138.50
3	Pajak Bumi	1,000,000,000	1,375,549,802.00	137.56												
	JUMLAH	20,872,548,149.50	40,402,412,145.74	193.71	41,299,548,350	46,957,000,010	113.70	49,873,148,000	54,051,931,660	108.36	56,416,196,000	60,054,595,126	106.45	67,926,000,000	76,627,913,589	112.80

Ket. Kantor Pelayanan Pajak Daerah,
Kota Yogyakarta

Hana Prita Wajaka, SE
1945304126

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA**



Correlations

Correlations

		PPJU	DanaPPJU
PPJU	Pearson	1	.956(*)
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.	.011
	N	5	5
DanaPPJU	Pearson	.956(*)	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.011	.
	N	5	5

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TABEL DISTRIBUSI T 5%

DF	10%	5%	DF	10%	5%	DF	10%	5%	DF	10%	5%
1	5.314	12.708	51	1.675	2.008	101	1.650	1.984	151	1.655	1.976
2	2.920	4.303	52	1.675	2.007	102	1.660	1.983	152	1.655	1.976
3	2.353	3.182	53	1.674	2.006	103	1.660	1.983	153	1.655	1.976
4	2.132	2.770	54	1.674	2.005	104	1.660	1.983	154	1.655	1.975
5	2.015	2.571	55	1.673	2.004	105	1.659	1.983	155	1.655	1.975
6	1.943	2.447	56	1.673	2.003	106	1.659	1.983	156	1.655	1.975
7	1.905	2.365	57	1.672	2.002	107	1.659	1.982	157	1.655	1.975
8	1.880	2.308	58	1.672	2.002	108	1.659	1.982	158	1.655	1.975
9	1.833	2.282	59	1.671	2.001	109	1.659	1.982	159	1.654	1.975
10	1.812	2.226	60	1.671	2.000	110	1.659	1.982	160	1.654	1.975
11	1.796	2.201	61	1.670	2.000	111	1.659	1.982	161	1.654	1.975
12	1.782	2.179	62	1.670	1.999	112	1.659	1.981	162	1.654	1.975
13	1.771	2.160	63	1.669	1.998	113	1.658	1.981	163	1.654	1.975
14	1.761	2.145	64	1.669	1.998	114	1.658	1.981	164	1.654	1.975
15	1.753	2.131	65	1.669	1.997	115	1.658	1.981	165	1.654	1.974
16	1.746	2.120	66	1.668	1.997	116	1.658	1.981	166	1.654	1.974
17	1.740	2.110	67	1.668	1.996	117	1.658	1.980	167	1.654	1.974
18	1.734	2.101	68	1.668	1.995	118	1.658	1.980	168	1.654	1.974
19	1.729	2.093	69	1.667	1.995	119	1.658	1.980	169	1.654	1.974
20	1.725	2.086	70	1.667	1.994	120	1.658	1.980	170	1.654	1.974
21	1.721	2.080	71	1.667	1.994	121	1.658	1.980	171	1.654	1.974
22	1.717	2.074	72	1.666	1.993	122	1.657	1.980	172	1.654	1.974
23	1.714	2.069	73	1.666	1.993	123	1.657	1.979	173	1.654	1.974
24	1.711	2.064	74	1.666	1.993	124	1.657	1.979	174	1.654	1.974
25	1.708	2.060	75	1.665	1.992	125	1.657	1.979	175	1.654	1.974
26	1.708	2.058	76	1.665	1.992	126	1.657	1.979	176	1.654	1.974
27	1.703	2.052	77	1.665	1.991	127	1.657	1.979	177	1.654	1.973
28	1.701	2.048	78	1.665	1.991	128	1.657	1.979	178	1.653	1.973
29	1.699	2.045	79	1.664	1.990	129	1.657	1.979	179	1.653	1.973
30	1.697	2.042	80	1.664	1.990	130	1.657	1.978	180	1.653	1.973
31	1.695	2.040	81	1.664	1.990	131	1.657	1.978	181	1.653	1.973
32	1.694	2.037	82	1.664	1.989	132	1.656	1.978	182	1.653	1.973
33	1.692	2.035	83	1.663	1.989	133	1.656	1.978	183	1.653	1.973
34	1.691	2.032	84	1.663	1.989	134	1.656	1.978	184	1.653	1.973
35	1.690	2.030	85	1.663	1.988	135	1.656	1.978	185	1.653	1.973
36	1.688	2.028	86	1.663	1.988	136	1.656	1.977	186	1.653	1.973
37	1.687	2.026	87	1.663	1.988	137	1.656	1.977	187	1.653	1.973
38	1.686	2.024	88	1.662	1.987	138	1.656	1.977	188	1.653	1.973
39	1.685	2.023	89	1.662	1.987	139	1.656	1.977	189	1.653	1.973
40	1.684	2.021	90	1.662	1.987	140	1.656	1.977	190	1.653	1.973
41	1.683	2.020	91	1.662	1.986	141	1.656	1.977	191	1.653	1.972
42	1.682	2.019	92	1.662	1.986	142	1.656	1.977	192	1.653	1.972
43	1.681	2.017	93	1.661	1.985	143	1.656	1.977	193	1.653	1.972
44	1.680	2.015	94	1.661	1.985	144	1.656	1.977	194	1.653	1.972
45	1.679	2.014	95	1.661	1.985	145	1.655	1.976	195	1.653	1.972
46	1.679	2.013	96	1.661	1.985	146	1.655	1.976	196	1.653	1.972
47	1.678	2.012	97	1.661	1.985	147	1.655	1.976	197	1.653	1.972
48	1.677	2.011	98	1.661	1.984	148	1.655	1.976	198	1.653	1.972
49	1.677	2.010	99	1.660	1.984	149	1.655	1.976	199	1.653	1.972
50	1.675	2.009	100	1.660	1.984	150	1.655	1.976	200	1.653	1.972

3 4387428

PT. PLN (Persero) Distribusi
 Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
 UPJ: YOGYAKARTA SELATAN D. Pe 50-108-005679-0
 Tempat Pembayaran: SURABAYA, LEBUYANRANG

REKENING LISTRIK

Bulan: 11/2007
 Tgl. Cetak: 17-07-07 09:24:40

Nama: K. NUTUSREKARDI Lampiran: SLR/2200
 Alamat: DL. MANUNGGAH No. 7 Rt. 03 Ra. 18 MANUNGGAH

Kode	: CHBKTEL16600		
No. Gardu/Tiang	: 1108/32-073-4	Stand akhir LWBP	: 59127 kWh
Stand awal LWBP	: 58330	Pemakaian LWBP	: 20 kWh
Faktor kal	: 0	Stand akhir WBP	: 0 kWh
Stand awal WBP	: 0	Pemakaian WBP	: 40 kWh
Stand awal kWh	: 0	Stand akhir kWh	: 0 kWh
Faktor kal	: 0	Pemakaian kWh	: 237 kWh
Biaya Debit	: Rp 66.440		
Biaya Pemakaian	: Rp 142.915		
Discount	: Rp		

Angsuran : Rp
 Sub Jumlah : Rp 209.355
 Materai : Rp
 Biaya Keterlambatan : Rp

Jumlah : Rp 209.355
 Tertuang DUY RATUS SEMBILAN RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH

PLN menyetujui rekening ini sah tanpa tanda tangan

NO. 4226.105UR KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Bulan: 11/2007
 PAJAK PENERANGAN JALAN

ID. Pal: 50-108-005679-0 Nama: K. NUTUSREKARDI
 PPI: 82 Ro: 10.750
 Tertuang DUY BELAS RIBU WULUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH

1. PPI adalah merupakan pendapatan PEMKAB/PEMKOT /0001/03/07/12/10 AMCI-641.626278
 2. Pembayaran PPI harus sejalan PEMKAB/PEMKOT

69

- **INFORMASI LAYANAN PLN 123** (melalui semua jenis telepon) untuk mengwardi secara lengkap rekening baik, informasi penyambungan baru, pemutusan dalam meter, dan laporan gangguan.
 - Untuk sakatansi, angka hasil baca meter, kardi meter langganan (KM), atau foto yang ada, sebaiknya tidak hindarangi petugas saat saat pemetaan sacak kWh meter saat pemutusan dengan masalah KM.
 - Hatal pemutusan layanan rekening listrik ada dan paling lambat tanggal 28 setiap bulannya.
- SANKSI KETERLAMBATAN MEMBAYAR REKENING LISTRIK**
1. PT. PLN (Persero) berhak melaksanakan pemutusan sementara penyediaan tenaga listrik pada pelanggan, apabila pelanggan belum melunasi pembayaran rekening listrik dalam kurun waktu yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero).
 2. Pelanggan yang lambat membayar rekening listrik akan dikenakan sanksi denda (denda) juga dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan ketentuan tarif listrik sesuai dengan ketentuan.
 3. Penyambungan kembali listrik yang telah diputus akan dilakukan oleh PT. PLN (Persero) apabila pelanggan telah melunasi tunggakan rekening listrik ditambah biaya keterlambatan.
 4. Apabila dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak hari pertama pelaksanaan "pemutusan sementara" pelanggan belum juga melunasi tunggakan rekening listriknya, maka PT. PLN (Persero) berhak melakukan "pemutusan permanen" berupa pengubahan penyediaan tenaga listrik dengan mangamat sakatansi atau sakatansi melalui titik PT. PLN (Persero).
 5. Pemertian "penyambungan kembali" proses sebagai pemertian penyambungan baru dan pelanggan wajib melunasi tunggakan dan tagihan suruhan (bila ada).
- ✓ Pemasangan/penertian, pemertian, dan pemertian (PA) adalah kewajiban dari tanggung jawab PABSA.
 - ✓ Hermalah penggunaan energi listrik dengan masalah sakatansi.
 - ✓ Mencuri listrik adalah perbuatan tercela dan merupakan kejahatan.